



# RANCANGAN **RENJA**

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

# 2025



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala petunjuk dan ridhanya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelayanan masyarakat dalam hal merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Sebagai acuan penyelenggaraan layanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini berisi tentang prioritas Program dan Indikasi Kegiatan maupun Sub Kegiatan di Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dengan mempedomani sasaran yang telah tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi harus senantiasa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025. Semoga bermanfaat.

Tarempa, Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

**JAPRIZAL, S.Kom., M.A**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750120 200312 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II .....	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik .....	28
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik .....	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	62
BAB III .....	63
TUJUAN DAN SASARAN .....	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	63
3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	63
3.1.2 Badan Pusat Statistik .....	65
3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional .....	68
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik .....	69
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	71
BAB IV .....	86
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	86
BAB V .....	96
PENUTUP .....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat Perjanjian Kinerja (PK) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan



Anambas, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengintegrasian Data di Seluruh OPD, Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas, Keamanan Informasi, Menyebarkan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK, serta Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media sehingga dapat terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Penunjang Layanan Telekomunikasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan e-Government, pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah Menentukan arah kebijakan pembangunan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian di Tahun 2025 dan Mewujudkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan nasional.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD,



Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditentukan dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2023

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terakomodir dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2023 realisasi fisik di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan rata-rata sudah mencapai 79,75% dengan realisasi keuangan 91,82%.

Capaian keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik dan Keuangan  
s.d 31 Desember 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Persentase (%) Realisasi s.d 31 Desember 2022		Realisasi	Efisiensi
		Keuangan	Fisik		
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.326.570.180</b>	<b>94,06</b>	<b>97,54</b>	<b>5.950.812.809</b>	<b>375.757.371</b>



<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.952.200</b>	<b>99,83</b>	<b>99,34</b>	<b>35.892.500</b>	<b>59.700</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.927.600	99,92	99,95	34.900.000	27.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.600	96,87	98,73	992.500	32.100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.438.821.023</b>	<b>97,25</b>	<b>100</b>	<b>4.316.706.708</b>	<b>122.114.315</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.205.119.223	97,10	100	4.083.169.388	121.949.835
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.800.000	100,00	100,00	196.800.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	901.800	81,76	100,00	737.320	164.480
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.000.000	100	1000	36.000.000	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>758.008.700</b>	<b>78,81</b>	<b>87,50</b>	<b>597.418.332</b>	<b>160.590.368</b>
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0,00	0,00	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.759.200	96,26	100	4.581.000	178.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	96,00	100,00	2.400.000	100.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.004.600	89,73	100	16.156.000	1.846.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.683.400	85,96	100	45.288.400	7.395.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.873.500	79,98	100,00	45.288.400	13.790.948
Fasilitas Kunjungan Tamu	56.372.000	13,73	100	7.740.000	48.632.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.816.000	84,02	100	446.170.380	88.645.620
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.715.049</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.715.049</b>	<b>-</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.715.049	100	100	30.715.049	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.035.946.058</b>	<b>93,26</b>	<b>98,41</b>	<b>966.127.220</b>	<b>69.818.838</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.585.783	85,85	95,22	75.192.800	12.392.983
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.301.091	73,73	100	24.551.672	8.749.419
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.059.184	94,68	100	866.382.748	48.676.436
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.127.150</b>				



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>5.771.413.334</b>	<b>78,26</b>	<b>94,98</b>	<b>4.516.930.918</b>	<b>1.254.482.416</b>
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.771.413.334</b>	<b>78,26</b>	<b>94,98</b>	<b>4.516.930.918</b>	<b>1.254.482.416</b>
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	170.785.789	39,02	87,20	66.641.200	104.144.589
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	498.333.765	54,84	95,92	273.294.818	225.038.947
Pelayanan Informasi Publik	175.243.900	38,89	97,00	68.151.200	107.092.700
Layanan Hubungan Media	3.727.100.000	80,25	99,61	2.991.059.700	736.040.300
Pemyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.199.949.880	93,15	95,17	1.117.784.000	82.165.880
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>4.791.442.027</b>	<b>69,68</b>	<b>91,63</b>	<b>3.338.505.946</b>	<b>1.452.936.081</b>
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.181.597.665</b>	<b>69,39</b>	<b>103,84</b>	<b>2.901.767.614</b>	<b>1.279.830.051</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	177.002.300	79,58	80,60	140.867.160	36.135.140
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.004.595.365	68,94	127,09	2.760.900.454	1.243.694.911
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>609.844.362</b>	<b>71,61</b>	<b>79,42</b>	<b>436.738.332</b>	<b>173.106.030</b>
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	146.692.971	36,34	43,88	54.032.789	94.660.182
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	395.077.091	89,46	99,05	353.446.110	41.630.981
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	66.074.300	44,28	95,32	29.259.433	36.814.867
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>282.987.600</b>	<b>62,06</b>	<b>99,55</b>	<b>175.616.069</b>	<b>107.371.531</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>282.987.600</b>	<b>62,06</b>	<b>99,55</b>	<b>175.616.069</b>	<b>107.371.531</b>



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	241.730.600	59,77	100	144.473.629	97.256.971
Membangun Metadata Statistik Sektoral	41.275.000	75,48	99,11	31.142.440	10.114.560
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>596.245.980</b>	<b>31,45</b>	<b>75,42</b>	<b>188.067.020</b>	<b>408.178.960</b>
<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>404.672.980</b>	<b>28,83</b>	<b>50,99</b>	<b>116.657.740</b>	<b>288.015.240</b>
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	404.672.980	28,83	50,99	116.657.740	288.015.240
<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>191.573.000</b>	<b>37,28</b>	<b>99,84</b>	<b>71.409.280</b>	<b>120.163.720</b>
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	191.573.000	37,28	99,84	71.409.280	120.163.720
<b>TOTAL</b>	<b>17.768.659.121</b>	<b>79,75</b>	<b>91,82</b>	<b>14.169.932.762</b>	<b>3.598.726.359</b>

### **2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan**

Adapun faktor – faktor penyebab keberhasilan terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Adanya komitmen para pengambil kebijakan sampai kepada para pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan dengan waktu yang ditetapkan;
  - b. Adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antar pejabat PPID Utama dengan pejabat PPID Pembantu di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;



- c. Kerjasama dan tanggung jawab atasan dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan
  - d. Kemampuan manajemen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
  - e. Koordinasi terkait ide atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dengan metode yang efisien dan efektif;
  - f. Adanya tolak ukur sehingga adanya kontrol dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
  - g. Melakukan evaluasi kegiatan secara rutin sehingga kendala yang dihadapi dapat terkontrol dengan baik;
  - h. Adanya rencana pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melakukan monitoring kemajuan kegiatan;
  - i. Melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. Komitmen semua pihak sehingga keberhasilan kegiatan dapat terpenuhi.
2. Urusan Statistik
- a. Komitmen Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Staistik sektoral pada tahun 2023;
  - b. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai walidata dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai pembina data;
  - c. Tersedianya portal statistik Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - d. Tersedianya dokumen data statistik sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - e. Tersusunnya metadata variabel kegiatan statistik sektoral dari perangkat daerah sebagai informasi dari data statistik sektoral.
3. Urusan Persandian
- a. Komitmen Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2023;



- b. Koordinasi yang baik dari seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan keamanan informasi persuratan;
- c. Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai; dan
- d. Serta kerjasama yang baik dengan pihak stakeholder Pemerintah Daerah Dan Pusat.

Adapun faktor – faktor penyebab tidak terpenuhinya terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Adanya rasionalisasi anggaran;
  - b. Masih banyak PPID Pembantu di Perangkat Daerah yang belum memberikan informasi pada publik; dan
  - c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan website PPID.
2. Urusan Statistik
  - a. Kurang respon perangkat Daerah dalam mengumpulkan data statistik sektoral;
  - b. Belum tersediannya portal Satu Data Anambas;
  - c. Belum terselenggaraannya Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
  - d. Kurang mengertinya akan pentingnya keamanan informasi;
  - e. Capaian kinerja masih belum sinkron dengan indicator kinerja berdasarkan KEPMENDAGRI 050-5889 tahun 2021; dan
  - f. Perlunya perbaikan terhadap capaian kinerja yang sesuai dengan program kegiatan.



3. Urusan Persandian
  - a. Masih banyak stakeholder yang menyepelekan pentingnya dokumen informasi yang berklarifikasi;
  - b. Kurang responnya pemerintah pusat terkait pengaduan kendala menggunakan aplikasi berklasifikasi;
  - c. Koordinasi masih dinilai lambat; dan
  - d. Masih ada infrastruktur yang belum tersedia.

### **2.1.2 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Rencana Kerja (RENSTRA) Perangkat Daerah**

- a. Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian penting dan berimplikasi besar dalam upaya pencapaian target Program Renstra Diskominfo karena dari semua hal ada keterkaitannya, tentang bagaimana kita menginformasikan kepada publik mengenai kinerja, konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kebijakan terkhusus di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Adapun implikasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terselenggara dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023 baik dari keterbatasan anggaran, pengembangan akses telekomunikasi, peningkatan kualitas SDM IT dan perekrutan tenaga IT. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan. yaitu menentukan kegiatan yang menjadi prioritas dan melakukan pelatihan secara daring serta melakukan rekrut SDM IT;
- c. Tersediannya data statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai data dan informasi acuan untuk perencanaan pembangunan daerah;



- d. tersediannya data statistik sektoral yang dapat menjadi bahan evaluasi/pengukuran pembangunan daerah;
- e. meningkatnya data keamanan persandian daerah yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah ditandai dengan mulai diterapkannya tanda tangan elektronik pada surat-menyerurat;
- f. meningkatnya coverage area Radio Pancar Ulang (RPU) yang dapat digunakan untuk komunikasi antar daerah; dan
- g. Terpenuhinya penilaian Indeks Keamanan Informasi (IKAMI).

### **2.1.3 Kebijakan / Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut**

- a. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar reviu setiap triwulan, terutama membahas serapan anggaran agar sesuai dengan tata kelola program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan stakeholders dan Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga akses telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terpenuhi;
- d. Mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM IT dengan anggaran yang terbatas sehingga dilakukan secara daring;
- e. Mengikuti seminar daring untuk meningkatkan pemahaman bidang IT;
- f. Melakukan rekrutmen tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- g. Menyusun regulasi dan perencanaan urusan statistik sektoral dan persandian daerah berupa Peraturan Bupati dan



- penyusunan master plan kegiatan Statistik sektoral dan persandian Daerah;
- h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan urusan persandian di daerah untuk memastikan tercapainya target capaian urusan statistik sektoral dan persandian daerah;
  - i. Meningkatkan sinergi antar instansi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam pemanfaatan data dan pengamanan informasi;
  - j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan urusan pemerintahan untuk memastikan tercapainya target program kegiatan; dan
  - k. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan terlaksananya program kegiatan urusan statistik sektoral dan persandian daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kelemahan/kekurangan tersebut sebagai umpan balik (feed back) dari apa yang telah dan akan dilaksanakan untuk di masa yang akan datang.



Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik s/d Tahun 2023  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	0	100%	100%	100%			
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			



2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	100%	100%	100%		-	
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	-	-				
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0	-	-	-		-	



<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	100%	96,26%	100%			
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	100%	96%	100%			
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	100%	89,73%	100%			
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	100%	85,96%	100%			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	100%	79,98%	100%			
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	100%	13,73%	100%		-	-



2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	100%	84,02%	100%			
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0	-	-				
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0	-	-				
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%			
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	100%	85,85%	95,22%	100%		



2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	100%	73,73%	100%			
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	100%	94,68%	100%			
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	0	100%	14,57%	100%			
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	1 Dokumen	-1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	-



		Opini dan Aspirasi Publik								
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	0	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0	-	-	-			
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	0	100%	93,15%	95,17%	-		
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	<b>92,86%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69,68%</b>	<b>91,63%</b>	<b>100%</b>	<b>92,68%</b>	<b>100%</b>



<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen				
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	0	30 Unit	30 Unit				
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen				



2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit				
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit				
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen				
					0,00%	0%				
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>		
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>63,64%</b>	<b>-</b>	<b>27,27%</b>	<b>0%</b>		<b>27,27%</b>		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen				



2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3 Orang	0	-	-				
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen				
					0,00%	0%				
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>19,35%</b>	<b>3,23%</b>	<b>9,68%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>9,68%</b>		
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik</b>	<b>16,13%</b>	<b>3,23%</b>	<b>9,68%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>9,68%</b>		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan				
2.21.02.2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG</b>	<b>50,00%</b>	<b>40,74%</b>	<b>44,44%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>44,44%</b>		



2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	0	1 OPD	1 OPD				
-----------------	---	--	--------------------	---	-------	-------	--	--	--	--

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan. Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kerjanya seperti disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Sub Kegiatan	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra Diskominfo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	



		Perangkat Daerah											
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang	29 Orang	30 Orang	37 Orang	100%	-	29 Orang	30 Orang	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	-	1 Laporan	1 Laporan	



2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	100%	8 Orang	8 Orang	-	-	8 Orang	8 Orang	
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	



2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100%	1 Paket	3 Paket		-	1 Paket	3 Paket	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	4 Paket		-	1 Paket	4 Paket	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100%	1 Laporan	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100%	77 Kali	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	4 Unit	4 Unit	4 Unit		-	1 Unit	4 Unit	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	100%	9 Unit	4 Unit		-	9 Unit	4 Unit	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan			1 Unit	-	1 Unit	1 Unit					



		Lainnya yang Disediakan											
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100%	6 Unit	16 Unit	0%	-	6 Unit	16 Unit	
					-				-	-			



<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			50 Laporan	50 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			350 Berita	400 Berita	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			80 Informasi	85 Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			1 Layanan	7200 Berita	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1 Layanan	1 Layanan	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			-	-	3 Orang	-	-	-	3 Orang	3 Orang	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik			-	3 unit	2 Unit	-	-	-	3 Unit	2 Unit	



	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah</b>			<b>85,71%</b>	<b>92,86%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,86%</b>	<b>100%</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			30 Unit	93,33%	30 Unit	30 Unit	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



		<b>tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>											
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			1 Unit	70,00%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1 Dokumen	98,15%	100%	-	1 Dokumen	-	98,15%	100%	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>45,45%</b>	<b>63,64%</b>	<b>81,82%</b>	<b>100%</b>		<b>-</b>	<b>81,82%</b>	<b>100%</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			6 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	5 Orang	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	60,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>			<b>16,13%</b>	<b>19,35%</b>	<b>22,58%</b>	<b>29,03%</b>		<b>-</b>	<b>19,35%</b>	<b>22,58%</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan</b>			<b>16,13%</b>	<b>19,35%</b>	<b>22,58%</b>	<b>29,03%</b>		<b>-</b>	<b>19,35%</b>	<b>22,58%</b>	



	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengamanan Dokumen Elektronik</b>											
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	19,35%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG</b>			<b>50,00%</b>	<b>53,70%</b>	<b>59,26%</b>	<b>62,96%</b>		<b>-</b>	<b>59,26%</b>	<b>62,96%</b>	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			1 OPD	53,70%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 OPD	-	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	



Analisis yang dilakukan oleh terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

- a. Keterbukaan Informasi Publik bagi semua Badan Publik atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempengaruhi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- b. Beberapa tolak ukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yaitu adanya peningkatan pembangunan akses telekomunikasi untuk memberikan sinyal kepada daerah-daerah yang masih blankspot di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga untuk melakukan komunikasi seluler masyarakat tidak harus jauh-jauh lagi mencari sinyal;
- c. Selain akses telekomunikasi, pelayanan akses internet Perangkat Daerah baik itu Dinas, Kecamatan, Desa, Sekolah, Puskesmas dan Objek Wisata pada tahun 2023 sudah terpenuhi dan dilakukan maintenance jika terjadi gangguan baik dengan penggantian perangkat secara langsung maupun koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Tidak hanya terbatas pada akses telekomunikasi dan akses internet, pelayanan juga dilakukan terhadap penggunaan aplikasi maupun website yang disediakan sehingga untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan melalui website yang telah disediakan;
- d. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik Sektoral dari perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (renstra) setiap Perangkat Daerah. Data statistik sektoral tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini karena perangkat Daerah telah memiliki dan menggunakan data yang tertuang dalam renstra perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, sehingga perangkat daerah bisa menggunakan data yang dipublikasikan oleh diskominfotik dalam melaksanakan evaluasi capaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, tersusunnya metadata

variabel kegiatan statistik sektoral memberikan kemudahan dalam menjelaskan informasi tentang konsep dan definisi dari data-data sektoral yang dikumpulkan oleh walidata dari produsen data sektoral, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan data. Selain itu untuk mendukung Kebijakan Satu data Indonesia dalam menghasilkan data yang akurat, Mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- e. Capaian kinerja pelayanan pada urusan persandian ditandai dengan tercapainya indikator pemenuhan nilai indeks KAMI sesuai dengan target kinerja Kepala Dinas. Salah satu pendukung dalam pemenuhan Indeks KAMI yaitu terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan capaian 24 OPD yang telah didaftarkan sertifikat elektroniknya. Manfaat dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diantaranya yaitu dapat menghemat penggunaan kertas, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan penandatanganan dokumen dimanapun berada, serta dapat menjamin keorisinilan tanda tangan. Karena dengan menggunakan tanda tangan elektronik, seseorang tidak bisa lagi meniru tanda tangan dan identitas diri pengguna dijaga kerahasiannya.

### **2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan

adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kebijaksanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian jangka menengah. Maka dapat ditetapkan isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **2.3.1 Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Hal ini menuntut tersedianya pelayanan publik yang bersifat pasti dalam persyaratan, waktu serta akuntabel

- benar-benar dibutuhkan sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Daya kritis masyarakat bertambah dan akses terhadap media semakin luas dengan berbagai pilihan dan kemudahan. Hal ini dibutuhkan tersedianya media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan kualitas isi pesan yang diproduksi;
  3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam penguasaan teknologi informasi, profesionalisme dan kepribadian Sumber Daya Manusia;
  4. Salah satu isu strategis yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah akses telekomunikasi dan pengembangan IT. Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, Dinas terus melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah, penyelenggara telekomunikasi dan melakukan pengembangan-pengembangan bidang IT;
  5. Salah satu isu strategis yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Merdeka Sinyal 2024 sejalan dengan visi misi Bupati Kepulauan Anambas.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, terkhusus pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Teknis  
PPID sebagai pengelola informasi adakalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta, hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi sehingga

harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu yang cepat atau tidak lengkap, hal ini menyebabkan waktu menjawab menjadi lebih lama bahkan melebihi ketentuan.

2. Substansi

Informasi yang diminta adakalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab sertamerta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Undang-undang tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi, dikhawatirkan bila jawaban informasi yang disampaikan tidak sesuai karena menyalahi aturan lain akibat ketidakpahaman petugas informasi.

3. Eksternal

Permohonan informasi tidak dapat langsung diproses, hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon informasi dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadangkalanya mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga diharuskan kembali mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan, hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan informasi secara jelas dan rinci.

- a. Pola pikir sebagian badan publik yang masih menganggap Keterbukaan Informasi Publik bukan hal yang penting;
- b. Komitmen sebagian badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;



- c. Masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal;
- d. Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik; dan
- e. Masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik untuk peningkatan kapasitas PPID.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, tekhusus pada Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial pemerintah seringkali masih bersifat satu arah tanpa banyak memperhatikan dialog interaktif dan diskusi;
  2. Fenomena hoaks di media sosial juga dapat menimbulkan beragam masalah, efek dari penyebaran pesan hoaks tersebut dapat diperparah dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang cenderung percaya begitu saja dengan berita yang beredar;
  3. Ketersediaan jumlah pegawai yang belum memadai dan kompetensi pegawai yang sebagian besar kurang sesuai dengan bidang kerjanya; dan
  4. Pengembangan pelayanan yang berbasis elektronik secara online belum maksimal oleh perangkat daerah dalam mengelola website maupun media sosial.
- 
1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika tentunya tidaklah mudah, hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi hanya terbatas mengusulkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemerataan jaringan telekomunikasi di daerahnya;
  2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang notabeneanya adalah kepulauan dan berbukit sehingga untuk pengembangan akses

- telekomunikasi sangatlah mahal dan mobilitas perangkat yang sangat sulit tergantung dengan kondisi cuaca dan kontur wilayah;
3. Selain penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan IT. Hal ini dikarenakan SDM IT yang dimiliki masih terbatas sehingga beberapa pekerjaan harus diprioritaskan untuk dilakukan pengembangan setiap tahunnya;
  4. Peran Statistik Sektoral belum optimal dalam Pemetaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Belum Mengacu Kepada Satu Data Indonesia (SDI), Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
    - a. Belum diterbitnya Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
    - b. Data statistik sektoral yang bersifat dinamis; dan
    - c. Kurangnya Kesadaran Produsen Data Untuk Mencatat dan Melaporkan Data Statistik Sektoral.
  5. Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
    - a. Belum Optimalnya Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
    - b. Belum optimal nya pemanfaatan portal statistik sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas.
  6. Peran Persandian yang belum Optimal Pengamanan Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Belum Optimal dikarenakan tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment, hal tersebut disebabkan oleh :
    - a. Perlu peningkatan kualitas Self Assesment keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
    - b. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
    - c. Perlu perningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Keamanan Informasi, Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi. hal tersebut disebabkan oleh Tren perkembangan digital semakin memegang peranan penting dalam proses interaksi antar organisasi maupun individu sehingga mendorong semakin tingginya resiko kejahatan siber dan harus ada kesiapan dari organisasi.

### **2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti NSPK, SPM Dan Sdgs (Suistanable Development Goals)**

1. Nilai persentase Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh akan berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ataupun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik . Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Sejalan dengan tujuan good governance dengan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Komunikasi dan koordinasi yang intens antara PPID Utama dengan PPID Pembantu sangat dibutuhkan untuk senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki disetiap Perangkat Daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki;
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu adanya keterlambatan pengembangan akses telekomunikasi hal ini ditandai dengan adanya perbedaan kualitas sinyal di tiap-tiap daerah, selain itu adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang dikarenakan keterbatasan SDM IT. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menjadi faktor penghambat

yang signifikan hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika sudah mencapai sesuai target.

#### **2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai berikut :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut;
- b. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat;
- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah;
- d. Dalam memberikan pelayanan akses telekomunikasi secara maksimal tentunya kualitas sinyal yang ada di Kecamatan diharapkan sama dengan di Kabupaten dan bisa menyamai Perkotaan; dan
- e. Pengembangan aplikasi membutuhkan SDM IT yang handal akan tetapi keterbatasan SDM IT menjadi faktor penghambat dalam pengembangan aplikasi dan harus dilakukan prioritas sesuai kebutuhan.

Adapun peluang yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin cukup baik antar Perangkat Daerah maupun stakeholders; dan
- d. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga terus dilakukan peningkatan akses telekomunikasi dan terus melakukan pelatihan dan rekrutmen SDM IT

sehingga kuantitas SDM IT menjadi lebih banyak serta diimbangi dengan kualitas yang sangat baik.

### **2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan**

Penerapan open government untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

- a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website PPID;
- b. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
- c. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses oleh publik;
- d. Dengan letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbukit, maka pada tahun berikutnya akses telekomunikasi sudah dapat dirasakan oleh semua masyarakat sampai ke Dusun yang ada;
- e. Kualitas sinyal sama antara daerah yang berada di Kecamatan dan Kabupaten serta menyamai Perkotaan;
- f. Adanya prioritas terhadap aplikasi yang sudah dikembangkan untuk terus digunakan baik Dinas sendiri maupun Dinas lain; dan
- g. Adanya peningkatan SDM IT.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkorelasi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana dan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026.

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik program prioritas yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam Misi ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) adalah sebagai berikut :

Misi ke 3 (tiga) yaitu :

**“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**

Misi ke 4 (empat) yaitu :

**”Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah”**

Gambaran identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.145.003.985</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.009.221.165</b>	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	45.956.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	45.956.600	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.237.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.237.100	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	2.719.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep.	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Dokumen	2.719.500	



			Perangkat Daerah				Anambas	Kinerja Perangkat Daerah			
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.609.787.767</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.609.787.767</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	4.411.147.767	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	4.411.147.767	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	197.040.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	197.040.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.600.000	
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33.564.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33.564.000</b>	



2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	0
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>502.280.623</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>380.930.623</b>



2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.111.623	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.111.623	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.912.368	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.912.368	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.752.152	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.752.152	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.880.230	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.880.230	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.673.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.673.250	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.520.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.520.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	368.431.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	247.505.000	



2.16.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29.441.712</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29.441.712</b>	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4.218.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4.218.000	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.223.712	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.223.712	
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>848.638.287</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>848.638.286</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.432.279	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.432.278	



2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.360.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	759.846.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	759.846.008
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>75.334.996</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>60.902.177</b>
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	69.364.996	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	54.932.177
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	5.970.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	5.970.000



<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>4.117.713.922</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>3.858.476.630</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>100%</b>	<b>4.117.713.922</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>100%</b>	<b>3.858.476.630</b>	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	50.187.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	30.516.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	330.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	101.937.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	70.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	29.632.308	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	3.648.526.922	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	3.648.526.922	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	19.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	17.000.000	



2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	73.929.526	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	30.864.400
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah</b>	<b>85,71 %</b>	<b>3.454.638.263</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah</b>	<b>85,71%</b>	<b>3.300.836.914</b>
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%	3.298.836.914	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%	3.233.045.294
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	142.500.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	125.150.000



			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	3.156.336.914	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	3.107.895.294	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>155.801.349</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>67.791.620</b>	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	26.500.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	26.500.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	101.801.349	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	19.166.620	



2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	27.500.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	22.125.000	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>161.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>402.987.600</b>	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	45,45 %	161.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	45,45%	80.750.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	47.000.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	41.00.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	8.250.000	



2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	45.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	25.500.000	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>16,13 %</b>	<b>349.999.339</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>16,13%</b>	<b>153.000.000</b>	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	16,13 %	244.999.834	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	16,13%	94.551.500	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	244.999.834	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	94.551.500	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	50,00 %	104.999.505	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	50,00%	58.448.500	



2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	104.999.505	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	58.448.500		
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>14.302.285.071</b>	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>13.402.285.071</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menerima adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Kepulauan Anambas

**Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2022 yaitu :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

#### **3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam

pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3.1.2 Badan Pusat Statistik**

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan

penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data agar dapat tersedia lebih cepat, dan dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Peningkatan kebutuhan daya yang diperlukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktifitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat, upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas daya yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

### **3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional**

Melalui pelaksanaan arah Organisasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Misi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia;
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Tujuan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN);

Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima;
3. Terwujudnya birokrasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

Rancangan Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut :

Rancangan Tema Pembangunan :

#### **“Optimalisasi Pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”**

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi;

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai; dan
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) juga mengacu kepada sasaran yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi



Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik; dan
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(65.00) B
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(64.00) B
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai		Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	-
		Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan	-
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,61) B
		Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	75,00
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(87.00) Menuju Informatif
Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	66,67%		



		Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
--	--	---	--	---

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 – 2026

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**B. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
  - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
  - d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

**C. Program Aplikasi Informatika**

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.



**D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
  - c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

**E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025, maka dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :



**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024  
dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>6.145.003.985</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>6.009.221.165</b>
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>45.956.600</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>45.956.600</b>



2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	4 Dokumen	43.237.100	APBD KKA	-	4 Dokumen	43.237.100
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	2 Dokumen	2.719.500	APBD KKA	-	2 Dokumen	2.719.500
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>4.609.787.767</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>4.609.787.767</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	32 Orang	4.411.147.767	APBD KKA	-	37 Orang	4.411.147.767
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	197.040.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	197.040.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	1.600.000	APBD KKA	-	1 Laporan	1.600.000



<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>33.564.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>33.564.000</b>
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	33.564.000	APBD KKA	-	1 Laporan	33.564.000
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>343.553.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kep. Anambas	2 Paket		APBD KKA	-	3 Paket	-
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kep. Anambas	8 Orang		APBD KKA	-	8 Orang	-
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>502.280.623</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>380.930.623</b>



2.16.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	5.111.623	APBD KKA	-	1 Paket	5.111.623
2.16.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	9.912.368	APBD KKA	-	2 Paket	9.912.368
2.16.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	14.752.152	APBD KKA	-	3 Paket	14.752.152
2.16.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	37.880.230	APBD KKA	-	4 Paket	37.880.230
2.16.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	53.673.250	APBD KKA	-	2 Paket	53.249.250
2.16.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	12.520.000	APBD KKA		1 Laporan	12.520.000
2.16.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	368.431.00	APBD KKA	-	1 Laporan	247.505.000
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>29.441.712</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>29.441.712</b>



2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit		APBD KKA	-	4 Unit	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	9 Unit	4.218.000	APBD KKA	-	4 Unit	4.218.000
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	25.223.712	APBD KKA	-	1 Unit	25.223.712
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>848.638.287</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>848.638.286</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	47.432.279	APBD KKA	-	1 Laporan	47.432.278
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	41.360.000	APBD KKA	-	1 Laporan	41.360.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	759.846.008	APBD KKA	-	1 Laporan	759.846.008



		Kantor yang Disediakan							
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>75.334.996</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>60.902.177</b>
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Anambas	6 Unit	69.364.996	APBD KKA	-	16 Unit	54.932.177
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	Kab. Kep. Anambas	100%	5.970.00	APBD KKA	-	100%	5.970.000
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>4.117.713.922</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>3.858.512.730</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>4.117.713.922</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>3.858.512.730</b>
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	50.187.000	APBD KKA		1 Dokumen	30.516.000



		Opini dan Aspirasi Publik							
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	330.000.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	101.973.100
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	70.000.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	29.632.308
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	1 Layanan	3.648.526.922	APBD KKA	-	1 Layanan	3.648.526.922
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kep. Anambas	3 Orang	19.000.000	APBD KKA	-	3 Orang	17.000.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	2 Unit	73.929.526	APBD KKA	-	2 Unit	30.864.400
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>85,71%</b>	<b>3.454.638.263</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>92,86%</b>	<b>3.300.836.914</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>3.298.836.914</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>3.233.045.294</b>



	<b>Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Daerah Kab. Kep. Anambas</b>							
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	142.500.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	125.150.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	30 Unit	3.156.336.914	APBD KKA	-	30 Unit	3.107.895.294
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>67.791.620</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>125.150.000</b>
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	26.500.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	26.500.000



2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	101.801.349	APBD KKA	-	1 Unit	19.166.620
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	27.500.000	APBD KKA	-	1 Unit	22.125.000
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>100%</b>	<b>161.000.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>80.750.000</b>
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas	45,45%	161.000.000	APBD KKA	-	63,64%	80.750.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	75.000.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	47.000.000



2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	1 Orang	41.00.000	APBD KKA	-	1 Orang	8.250.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	45.000.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	25.500.000
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>16,13%</b>	<b>349.999.339</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>19,35%</b>	<b>153.000.000</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>16,13%</b>	<b>244.999.834</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>19,35%</b>	<b>94.551.500</b>
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	244.999.834	APBD KKA	-	1 Laporan	94.551.500



<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG</b>	<b>Kab. Kep. Anambas</b>	<b>50,00%</b>	<b>104.999.505</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>-</b>	<b>53,70%</b>	<b>58.448.500</b>
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Kep. Anambas	1 Perangkat Daerah	104.999.505	APBD KKA	-	1 Perangkat Daerah	58.448.500

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berdasarkan hasil dari keputusan Bersama saat dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah terdapat beberapa rencana kerja yang disepakati untuk menjadi fokus dan arah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 yaitu :

#### **URUSAN KOMUNIKASI**

- a. Sub Kegiatan Nama Domain : Penyelenggaraan domain yang di Kelola oleh Diskominfotik, dengan melakukan sewa terkait Web Hosting, Web Mail, Lisensi Certifikat, dan IP Publik untuk masyarakat. Rencana akan dilakukan penambahan kapasitas penyimpanan web Hosting;
- b. Sub Kegiatan Jaringan Intra : Jaringan masih tetap melakukan hal yang sama seperti di tahun sebelumnya, dan akan menyediakan rencana pembangunan jaringan Intranet untuk kantor baru Perangkat Daerah di Pasir Peti. Serta mencoba untuk melakukan perluasan/membagi kapasitas bandwidth ke Kecamatan siantan timur khususnya untuk di kantor camat. Akan coba melakukan sewa fiber optik atau radio untuk di pulau jemaja dan palmatak. Hal ini membutuhkan biaya terkait merdeka sinyal;
- c. Sub Kegiatan SPBE : Melakukan penerapan sesuai amanat PerPres 95 tahun 2018, dan pengembangan dari dokumen arsitektur untuk membuat dokumen manajemen SPBE (Manajemen Resiko/Data);
- d. Sub Kegiatan Pusat Data : Melakukan Pengelolaan server dan rencana untuk melakukan layanan data persuratan dalam hal tersebut mengingat sudah terbangunnya kantor/Gedung NOC Diskominfotik agar dapat dipergunakan dan bisa berjalan dengan maksimal harus melakukan relokasi perangkat dari gedung lama ke gedung baru dan membutuhkan penambahan kebutuhan dasar untuk Gedung guna menunjang pekerjaan;
- e. Sub Kegiatan Aplikasi : Mengembangkan aplikasi khususnya Aplikasi Satu Data Anambas yang di tahun 2023 masih tahap pengembangan dan pemetaan untuk OPD;



## **URUSAN INFORMATIKA**

- a. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harusnya menjadi motivasi bagi setiap kementerian dan lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik. Mengingat Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berkembang sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan juga harus semakin meningkat. Serta melakukan pengendalian dan kontrol akan isu-isu yang muncul dalam rangka keterbukaan informasi;
- b. Sub Kegiatan Konten Dan Perencanaan : Melakukan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sehingga semua agenda pemerintah daerah bisa terpublikasi dengan baik dan dikemas dalam konten yang akan menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah. Guna menunjang hal tersebut maka dibutuhkan penambahan Perangkat Multimedia Produksi dan Pengelolaan Konten Informasi;
- c. Sub Kegiatan Layanan Informasi Publik : Melakukan Forum Koordinasi PPID dalam rangka Penguatan dan Peningkatan Layanan PPID sehingga terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik dimana di tahun 2022 masih kegiatan tersebut belum terlaksana dikarenakan pandemi covid -19. Lebih meningkatkan rapat koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tanggungjawab dalam melakukan upload data yang menjadi bagian dari keterbukaan informasi dimana dalam hal ini masih kurangnya perhatian untuk memenuhi hal tersebut.  
Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media : Melakukan Pembinaan Pengelolaan dan Kerjasama antara media dengan Pemerintah

- Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meningkatkan pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan meningkatkan penyebaran melalui layanan media sosial;
- e. Penambahan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada Program Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya tidak tertuang di dalam Dokumen Rancangan Awal RENJA 2023 yang mana sub kegiatan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting guna meningkatkan pengetahuan dan peningkatan terkait mutu dari Sumber Daya Manusia (pegawai) yang membidangi peliputan secara luas dari sisi menciptakan konten-konten yang menarik;
  - f. Penambahan Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi ataupun menjadi prioritas bidang ke arah peliputan untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat salah satu nya kami sudah menyediakan ruang studio dan membutuhkan alat-alat guna menunjang ruangan tersebut sehingga informasi bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

### **URUSAN STATISTIK**

- a. Sub Kegiatan Data Statistik Sektoral : Fokus Kegiatan 2023 akan di arahkan sesuai dengan yang menjadi target dari BUPATI kepada Bidang Statistik, rencana bidang statistic akan melakukan pengumpulan terkait data-data pembangunan yang menjadi prioritas terkait indikator kinerja RENSTRA di Setiap OPD (21 OPD). Fokus terkait data hanya sampai mengumpulkan, rencana akan melakukan kajian evaluasi terkait data yg dibutuhkan (urgent).  
Di tahun 2022 sedang mencoba untuk melakukan kajian terkait infrastruktur yang di bangun terhadap perekonomian (khususnya di Kec. Siantan).  
Melakukan kajian hanya dengan tim statistik sendiri dengan BPS, bisa juga melibatkan OPD terkait dari apa yang akan di lakukan kajian



paling tidak minimal 1 atau 2 kajian setiap tahunnya terkait pembangunan;

Penambahan terkait Honorarium untuk petugas kordinator data di setiap OPD;

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Statistik : Peningkatan SDM untuk 4 orang agar di tambahkan, karena akan melakukan peningkatan ataupun pelatihan ke Kordinator data statistik di setiap OPD Bersama BPS;
- c. Sub Kegiatan Metadata Statistik : Seandainya di tahun 2022 ada melakukan kajian, bisa di tindaklanjuti untuk melakukan Metadata Kegiatan (penjelasan alur/proses awal sampai dengan publikasi). Yang di hasilkan hanya sekedar informasi/gambaran terkait kajian itu sendiri;

#### **URUSAN PERSANDIAN**

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik : Percepatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik guna sebagai pengamanan digital;
- b. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Memprioritaskan pengadaan Alat Penginderaan Jammer sebagaimana alat tersebut menjadi pelaporan baik capaian Kinerja Kepala Dinas yang menjadi sasaran dalam Perjanjian Kinerja dan menjadi Penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) setiap tahunnya dalam hal urusan Persandian.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.009.221.165</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>45.956.600</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.237.100	APBD KKA	4 Dokumen
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.719.500	APBD KKA	2 Dokumen
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.609.787.767</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.411.147.767	APBD KKA	32 Orang
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.040.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000	APBD KKA	1 Laporan



<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>33.564.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.564.000	APBD KKA	1 Laporan
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>	<b>-</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	APBD KKA	2 Paket
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	APBD KKA	8 Orang
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas</b>	<b>380.930.623</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.111.623	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.912.368	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14.752.152	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37.880.230	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	53.249.250	APBD KKA	1 Paket



2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.520.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.505.000	APBD KKA	1 Laporan
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>29.441.712</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.218.000	APBD KKA	9 Unit
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25.223.712	APBD KKA	1 Unit
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya</b>	<b>848.638.286</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.432.278	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41.360.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	759.846.008	APBD KKA	1 Laporan
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>60.902.177</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54.932.177	APBD KKA	6 Unit



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	5.970.000	APBD KKA	100%
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>3.858.512.730</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>3.858.512.730</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	30.516.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	101.973.100	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	29.632.308	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3.648.526.922	APBD KKA	1 Layanan
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	17.000.000	APBD KKA	3 Orang
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.864.400	APBD KKA	2 Unit
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah</b>	<b>3.300.836.914</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>85,71%</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas</b>	<b>3.233.045.294</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>



2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	125.150.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.107.895.294	APBD KKA	30 Unit
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah</b>	125.150.000	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	26.500.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	19.166.620	APBD KKA	1 Unit
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22.125.00	APBD KKA	1 Unit
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral</b>	<b>80.750.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>100%</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80.750.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>45,45%</b>
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.000.000	APBD KKA	1 Dokumen



2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8.250.000	APBD KKA	1 Orang
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	25.500.000	APBD KKA	1 Dokumen
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>153.000.000</b>	<b>APBD KKA</b>	<b>16,13%</b>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	94.551.500	APBD KKA	16,13%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	94.551.500	APBD KKA	1 Laporan
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	58.448.500	APBD KKA	50,00%
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58.448.500	APBD KKA	1 Perangkat Daerah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2021 – 2026).

Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas harus segera melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Karena Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk - produk teknologi informasi terbaru dan terbarukan dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama



dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personil Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas serta didukung segenap *stakeholders* yang ada.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan bisa dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat memacu kinerja aparatur sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tarempa, **Maret 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

**JAPRIZAL, S.Kom., M.A**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750120 200312 1 008